

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Obyek Penelitian

a. Data Umum

Jawa Tengah adalah Provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah, sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Jawa Timur. Ibu Kota Jawa Tengah adalah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah di bagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Tabel 4.1

Daftar Kabupaten di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab.	19	Kab. Pemalang
2	Banjarnegara	20	Kab. Purbalingga
3	Kab. Banyumas	21	Kab. Purworejo
4	Kab. Batang	22	Kab. Rembang
5	Kab. Blora	23	Kab. Semarang
6	Kab. Boyolali	24	Kab. Sragen
7	Kab. Brebes	25	Kab. Sukoharjo
8	Kab. Cilacap	26	Kab. Tegal
9	Kab. Demak	27	Kab. Temanggung
10	Kab. Grobogan	28	Kab. Wonogiri
11	Kab. Jepara	29	Kab. Wonosobo
12	Kab. Karanganyar	30	Kota Magelang
13	Kab. Kebumen	31	Kota Pekalongan
14	Kab. Pekalongan	32	Kota Salatiga
15	Kab. Kendal	33	Kota Semarang
16	Kab. Klaten	34	Kota Surakarta
17	Kab. Kudus	35	Kota Tegal
18	Kab. Magelang		
	Kab. Pati		

Sumber: Jatengprov.go.id, 2019

b. Data Khusus

1) Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara yang letaknya berada pada jarak 120 KM ke arah Barat dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Secara Astronomi terletak diantara 7.12 – 7.31 Lintang Selatan dan 109.29 – 109.45.50 Bujur Timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 1,069.71 km² atau 106.970.997 Ha atau sekitar 3,29 % dari luas wilayah propinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha).¹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 sampai tahun 2016 tetap di angka yang sama yaitu berjumlah 13 hotel. Dan mengalami peningkatan sebesar 20 jumlah wajib pajak di tahun 2017.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 53 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Banjarnegara tahun 2014 yakni 1132 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1675. Dan pada tahun 2016 mengalami pengurangan menjadi 990 jumlah reklame. Dan naik lagi menjadi 1002 di tahun 2017.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Banjarnegara dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014,

¹ Banjarnegarakab.go.id

pendapatannya mencapai Rp. 161.652.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 180.561.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 221.048.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 297.485.000.

2) Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat daya dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak diantara garis Bujur Timur $108^{\circ}39'17''$ sampai $109^{\circ}27'15''$ dan diantara garis Lintang Selatan $7^{\circ}15'05''$ sampai $7^{\circ}37'10''$ yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha.²

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Banyumas tahun 2014 mencapai angka 179 hotel. Dan di tahun 2015 turun menjadi 162 hotel. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yakni mencapai angka 150 hotel dan 145 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini pada tahun 2014 berjumlah 156 restoran. Kemudian pada tahun 2015 hingga tahun 2016 naik hingga angka 200 restoran. Dan tahun 2017 turun mencapai 197 restoran yang berada di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Banjarnegara tahun 2014 mencapai 1005 reklame, dan pada tahun selanjutnya naik

² Banyumaskab.go.id

menjadi 1150. Dan pada tahun 2016 turun menjadi 852 reklame. Namun, pada tahun 2017, kabupaten ini mampu naik hingga berjumlah 954 wajib pajak reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Banyumas dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 435.597.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 502.281.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 541.418.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 619.701.000.

3) Kabupaten Batang

Kabupaten Batang terletak pada $6^{\circ}51'46''$ sampai $7^{\circ}11'47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ}40'19''$ sampai $110^{\circ}03'06''$ Bujur Timur di pantai Utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayah sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Kendal, sebelah Selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah Barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.³

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Batang tahun 2014 kurang lebih sekitar 10 hotel. Dan naik menjadi 11 hotel pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 65

³ Batangkab.go.id

restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Batang tahun 2014 yakni 776 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 802. Dan peningkatan itu terus berlanjut sampai tahun 2016 yaitu berjumlah 889. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 750 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Batang dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 172.638.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 179.721.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 209.957.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp.220.878.000.

4) Kabupaten Blora

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Blora terletak sekitar 127 KM dari Kota Semarang, Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Terletak antara 111°016'-111°338' Bujur Timur dan diantara 6°5287°248' Lintang Selatan.⁴

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Blora tahun 2014 kurang lebih sekitar 33 hotel. Dan naik menjadi 35 hotel pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, di wilayah ini jumlah wajib hotel menurun

⁴ Blorakab.go.id

menjadi 29, dan terus menurun hingga 22 hotel pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 40 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Blora tahun 2014 yakni 511 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 642. Dan peningkatan itu terus berlanjut sampai tahun 2016 sampai tahun 2017, yaitu berjumlah 699 dan 832 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Blora dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 144.724.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 156.402.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 171.277.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 201.002.000.

5) Kabupaten Boyolali

Boyolali merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Boyolali terletak di koordinat: 10o 22' BT – 110o50' BT dan 7o36' LS – 7o71'LS. Wilayah administrasi kabupaten Boyolali terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 267 kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 916,69 jiwa/ dan luas wilayah

sebesar 1.015,10 . Kabupaten Boyolali memiliki populasi sebesar 930.531 jiwa.⁵

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Boyolali tahun 2014 kurang lebih sekitar 14 hotel. Dan naik menjadi 15 hotel pada tahun 2015 sampai tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, di wilayah ini jumlah wajib pajak hotel naik menjadi 20 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 84 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan naik menjadi 85 restoran di tahun 2017.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Boyolali tahun 2014 yakni 899 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1003. Dan peningkatan itu terus berlanjut sampai tahun 2016 sampai tahun 2017, yaitu berjumlah 1196 dan 1320 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Boyolali dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.227.516.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 260.633.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 292.310.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 320.653.000.

6) Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes terletak disepanjang pantai Utara Laut Jawa, merupakan salah satu

⁵ Boyolalikab.go.id

daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang keselatan berbatasan dengan wilayah Karesidenan Banyumas. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Letaknya antara 6°44` - 7°21` Lintang Selatan dan antara 108°41` - 109°11` Bujur Timur. Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.662,96 Km² yang terbagi menjadi 17 kecamatan.⁶

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Brebes tahun 2014 sampai tahun 2015 kurang lebih sekitar 11 hotel. Dan turun menjadi 10 hotel pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, di wilayah ini jumlah wajib hotel naik menjadi 13 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 65 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Brebes tahun 2014 yakni 763 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya turun menjadi 745. Dan meningkat kembali pada tahun 2016 berjumlah 945. Dan terus naik hingga 1043 wajib pajak reklame di tahun 2107.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Brebes dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.267.770.000. Dan

⁶ Disperakim.jatengprov.go.id

pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 301.953.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 339.156.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 352.521.000.

7) Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah Selatan Samudra Indonesia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Terletak diantara $108^{\circ}4' - 30'' - 109^{\circ}30'30''$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30' - 7^{\circ}45'20''$ garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha.⁷

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Cilacap tahun 2014 yaitu 48 hotel. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 49. Selanjutnya pada tahun 2016 hingga tahun 2017 naik menjadi 55 wajib pajak hotel yang berada di wilayah kabupaten Cilacap.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 198 restoran yang tercantum pada BPPKAD sektor pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Cilacap tahun 2014 yakni 968 reklame. Pada tahun

⁷ Cilacapkab.go.id

2015 jumlahnya turun drastis menjadi 542. Dan meningkat kembali pada tahun 2016 berjumlah 652. Dan terus naik hingga 995 wajib pajak reklame di tahun 2107.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Brebes dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.374.023.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 409.845.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 428.598.000. Dan di tahun 2017 mengalami penurunan sampai Rp. 307.600.000.

8) Kabupaten Demak

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak terletak pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}27'58''$ - $110^{\circ}48'47''$ Bujur Timur.⁸

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Demak tahun 2014 yaitu 4 hotel. Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi . Selanjutnya pada tahun 2016 hingga tahun 2017 tetap di angka yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 5 wajib pajak hotel.

⁸ Demakkab.go.id

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini tahun 2014 hanya 9 restoran. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga 2016 tetap diangka yang sama yakni berjumlah 12 restoran. Dan pada tahun 2017 naik lagi hingga 13 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Demak tahun 2014 yakni 986 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya turun menjadi 954. Dan turun kembali hingga tahun 2016 yang berjumlah 936, kemudian naik lagi menjadi 957 di tahun 2017.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Demak dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.220.329.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 254.324.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 287.457.000. Dan sampai di tahun 2017 naik terus hingga mencapai angka Rp. 299.784.000.

9) Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Ibukota Kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara goeografis, wilayah kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15` Bujur Timur - 111°25` Bujur Timur dan 7° Lintang Selatan - 7°30` Lintang Selatan dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur,perbukitan dan dataran dibagian tengahnya. Wilayah kabupaten Grobogan terletak di antara dua

pengunungan Kendeng dari arah barat ke timur.⁹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Grobogan tahun 2014 berjumlah 10. Kemudian tahun 2015 berjumlah 9 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan hingga di angka 10 dan 12 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 27 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Grobogan tahun 2014 yakni 540 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 550. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 663. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 691 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Grobogan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.235.295.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 272.716.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 299.211.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 321.000.000.

10) Kabupaten Jepara

Posisi geografis Kabupaten Jepara terletak dibagian Utara Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat 110°9`48,02° - 110°58`37,40°

⁹ Grobogankab.go.id

Bujur Timur dan $5^{\circ}43'20,67^{\circ}$ - $6^{\circ}47'25,83^{\circ}$ Lintang Selatan. Jarak terdekat dari Ibukota Kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 Km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 Km.¹⁰

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Jepara tahun 2014 berjumlah 40. Kemudian tahun 2015 berjumlah 61 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 70 dan 71 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 36 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan naik menjadi 40 restoran pada tahun 2017.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Jepara tahun 2014 yakni 1198 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1321. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 1550. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1490 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Jepara dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.231.673.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 270.251.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 322.509.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 521.065.000.

¹⁰ Jepara.go.id

11) Kabupaten Karanganyar

Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Karanganyar terletak di koordinat: $110^{\circ} 40'' - 110^{\circ} 70''$ Bujur Timur dan $70^{\circ} 28'' - 70^{\circ} 46''$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 177 kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 937,27 jiwa/ dan luas wilayah sebesar 800,20 . Kabupaten Sragen memiliki populasi sebesar 750.000 jiwa.¹¹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Karanganyar tahun 2014 berjumlah 187. Kemudian tahun 2015 berjumlah 176 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 di angka 192 dan 180 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 210 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Karanganyar tahun 2014 yakni 1198 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1321. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 1449. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1372 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Karanganyar dari tahun ketahun

¹¹ Karanganyarkab.go.id

mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.215.298.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 255.445.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 301.307.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 310.665.000.

12) Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 Ha atau 1.281,115 Km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.¹²

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Kebumen tahun 2014 berjumlah 29. Kemudian tahun 2015 berjumlah 30 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 tetap diangka yang sama, yakni berjumlah 34 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 44 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Kebumen tahun 2014 yakni 996 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1009. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 1059. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 973 reklame.

¹² Kebumenkab.go.id

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Kebumen dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.242.079.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 245.159.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 291.016.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 443.600.000.

13) Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke Selatan dengan Kota Kajen sebagai Ibukota pusat pemerintahan. Secara geografis terletak diantara $6^{\circ} - 7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} - 109^{\circ} 78'$ Bujur Timur.¹³

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Pekalongan tahun 2014 berjumlah 6. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2016 turun berjumlah 5 hotel. Kemudian tahun 2017 naik di angka 10 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 16 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan pada tahun 2017 naik di angka 25 restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Pekalongan tahun 2014 yakni 908 reklame. Pada tahun

¹³ Pekalongankab.go.id

2015 jumlahnya naik menjadi 922. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 893. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 842 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Pekalongan dari tahun ketahun mengalami nai turun. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 255.037.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya turun menjadi Rp. 251.558.000. Selanjutnya pada tahun 2016 turun lagi menjadi Rp. 310.572.000. Dan di tahun berikutnya naik menjadi Rp.339.661.000.

14) Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 Kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 109°40` - 110°18` Bujur Timur dan 6°32` - 7°24` Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten.¹⁴

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Kendal tahun 2014 berjumlah 22. Kemudian tahun 2015 berjumlah 25 hotel. Kemudian tahun 2016 turun menjadi 21 hotel, akan tetapi di tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 29 wajib pajak hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 87 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector

¹⁴ Kendalkab.go.id

pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2017 di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan mencapai 90 restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Kendal tahun 2014 yakni 980 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya turun menjadi 952. Dan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan hingga 850. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 899 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Kendal dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.215.294.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 239.564.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 265.074.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 287.932.000.

15) Kabupaten Klaten

Klaten merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Klaten terletak di koordinat: 7°32'19" LS - 7°48'33" LS 110°26'14" BT - 110°47'51" BT. Wilayah administrasi kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri dari 10 kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 1717 jiwa/ dan luas wilayah sebesar 655,56 . Kabupaten Klaten memiliki populasi sebesar 1.144.040 jiwa.¹⁵

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Klaten dari tahun 2014

¹⁵ Klatenkab.go.id

sampai tahun 2015 tetap di angka yang sama yaitu berjumlah 51 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 55 dan 61 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 99 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Klaten tahun 2014 yakni 1321 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1380. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 1994. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1839 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Sragen dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.177.922.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 190.622.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 224.197.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 287.012.000.

16) Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara empat Kabupaten yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Letak

kabupaten Kudus antara 110°36` dan 110°50` Bujur Timur dan antara 6°51` dan 7°16` Lintang Selatan. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 16 Km dan dari Utara ke Selatan 22 Km.¹⁶

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Kudus tahun 2014 berjumlah 38. Kemudian tahun 2015 berjumlah 45 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 di angka 53 dan 66 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini di tahun 2014 berjumlah 17 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2016 berjumlah 23 restoran. Dan di tahun 2017 naik secara drastis menjadi 67 restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Kudus tahun 2014 yakni 1536 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya turun menjadi 1535. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi hingga 1426. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1472 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Kudus dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.234.073.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 259.295.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 279.239.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 375.185.000.

¹⁶ Kuduskab.go.id

17) Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara $110^{\circ}01'51''$ dan $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}19'13''$ dan $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan.¹⁷

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Magelang tahun 2014 berjumlah 50. Kemudian tahun 2015 turun hingga 49 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 56 dan 76 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 82 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Magelang tahun 2014 yakni 2134 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 2765. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 2709. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2913 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Magelang dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.242.448.000. Dan

¹⁷ Diskominfo.magelangkab.go.id

pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 261.569.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 288.485.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 300.643.000.

18) Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur. Sebelah utara dibatasi wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Sebelah Barat dibatasi wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Sebelah selatan dibatasi wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Sebelah timur dibatasi wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.¹⁸

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Pati tahun 2014 berjumlah 29. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2016 berjumlah 30 hotel. Kemudian tahun 2017 naik menjadi 31 wajib pajak hotel yang berada di Kabupaten Pati.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 37 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Kemudian pada tahun 2017 jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Pati menurun hingga 34.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Pati tahun 2014 yakni 1311 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1409. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 1760. Dan

¹⁸ Patikab.go.id

pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1649 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Pati dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.279.254.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 310.063.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 314.921.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 327.661.000.

19) Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terdiri dari 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak antara $8^{\circ}52'30''$ - $7^{\circ}20'11''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ}40'30''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas: Utara- Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Purbalingga; Barat – Kabupaten Tegal; dan sebelah Timur- Kabupaten Pekalongan. Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.115,30 Km^2 yang terdiri dari luas lahan sawah sebesar 375,88 Km^2 , dan luas lahan bukan sawah 748,24 Km^2 .¹⁹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Pemalang tahun 2014 berjumlah 21. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2016 berjumlah 19 hotel. Kemudian tahun 2017 naik di angka 21 hotel.

¹⁹ Disperakim.jatengprov.go.id

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 28 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 29 wajib pajak restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Pemalang tahun 2014 yakni 1008 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1119. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 1110. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi sebesar 996 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Pemalang dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.217.345.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 230.435.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 275.458.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 291.075.000.

20) Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi $110^{\circ}11'$ - $109^{\circ}35'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}10'$ - $7^{\circ}29'$ Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalangan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara

dan Banyumas, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.²⁰

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Purbalingga tahun 2014 berjumlah 12. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2016 naik menjadi 13 hotel. Kemudian tahun 2017 naik secara drastis mencapai angka 35 wajib pajak hotel di Kabupaten Purbalingga.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 25 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai angka 27 wajib pajak.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Purbalingga tahun 2014 sampai tahun 2015 yakni 880 reklame. Pada tahun 2016 jumlahnya turun drastic menjadi 420. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 559 wajib pajak.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Purbalingga dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.202.593.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 215.622.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 251.816.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 355.859.000.

²⁰ Disperakim.jatengprov.go.id

21) Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang yang bersemboyan Rembang BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111°00` - 111°30` Bujur Timur dan 6°30` - 7°6` Lintang Selatan.²¹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Rembang tahun 2014 berjumlah 15. Kemudian tahun 2015 berjumlah 17 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 20 dan 22 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 31 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 33 wajib pajak.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Rembang tahun 2014 yakni 956 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1074. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 1003. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1193 reklame.

²¹ Rembangkab.go.id

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Karanganyar dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.178.642.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 193.122.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 234.168.000. Dan pada tahun 2017 pendapatannya mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 172.000.000.

22) Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi $110^{\circ}14'74''$ - $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}30'0''$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020.674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Semarang terletak di kota Ungaran. Secara administratif kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa. Batas-batas kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan kota Semarang dan Kabupaten Demak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.²²

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Semarang tahun 2014 berjumlah 223. Kemudian tahun 2015 turun menjadi 206 hotel. Kemudian tahun 2016

²² Semarangkab.go.id

sampai tahun 2017 naik hingga angka 250 wajib pajak hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 169 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan kemudian pada tahun 2017, wajib pajak restoran naik menjadi 170 wajib pajak.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Semarang tahun 2014 yakni 2431 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 2529. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 2331. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2951 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Semarang dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.248.231.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 278.851.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 318.536.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 386.444.000.

23) Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo terletak pada posisi $109^{\circ}47'28''$ - $110^{\circ}08'20''$ Bujur Timur, $7^{\circ}32'$ Lintang Selatan. Secara topografis merupakan wilayah beriklim tropis basah dengan suhu antara 19°C - 28°C , sedangkan kelembapan udara antara 70%-90% dan curah hujan

tertinggi pada bulan Desember 311mm dan bulan Maret 289mm.²³

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Purworejo tahun 2014 berjumlah 15. Kemudian tahun 2015 berjumlah 14 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 18 dan 19 wajib pajak hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 48 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan mencapai angka 47 wajib pajak restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Purworejo tahun 2014 yakni 1114 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya turun menjadi 1113. Dan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sektor pajak reklame terus meurun hingga angka 976 dan 952 wajib pajak reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Karanganyar dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.200.258.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 233.934.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 255.599.000. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 253.900.000.

²³ Purworejo.go.id

24) Kabupaten Sragen

Sragen merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Sragen terletak di koordinat: 71°5' - 7°30' LS, 110°45' - 111°10' BT. Wilayah administrasi kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan yang terdiri dari 208 kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 938,31 jiwa/ dan luas wilayah sebesar 941,55 . Kabupaten Sragen memiliki populasi sebesar 883.464 jiwa.²⁴

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Sragen dari tahun 2014 sampai tahun 2016 tetap di angka yang sama yaitu berjumlah 8 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 11 dan 15 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 66 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan berjumlah 69 restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Sragen tahun 2014 yakni 786 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 780. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 642. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 881 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Sragen dari tahun ketahun

²⁴ Sragenkab.go.id

mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.254.392.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 267.711.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 297.176.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 312.008.000.

25) Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Sukoharjo terletak di koordinat: 07° 42' LS 110° 50' BT. Wilayah administrasi kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang 48 terdiri dari 167 kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.766,25 jiwa/ dan luas wilayah sebesar 466,66 . Kabupaten Sukoharjo memiliki populasi sebesar 824.238 jiwa.²⁵

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan.pada tahun 2014 berjumlah 15, di tahun selanjutnya naik menjadi 17 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 naik di angka 20 dan 22 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 131 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Sukoharjo

²⁵ Sukoharjokab.go.id

tahun 2014 yakni 667 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 740. Dan pada tahun 2016 sampai tahun 2017, jumlah reklame yang tercantum tetap mengalami kenaikan yaitu berjumlah 900 dan 990 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Sukoharjo dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.264.814.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 313.947.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 363.163.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 387.220.000.

26) Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan satu dari sekian banyaknya kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan Slawi sebagai Ibukota. Kabupaten Tegal secara geografis terletak antara $108^{\circ}57'6''$ - $109^{\circ}21'30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'41''$ - $7^{\circ}15'30''$ Lintang Selatan.²⁶

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Tegal dari tahun 2014 yakni 36 wajib pajak hotel. Dan mengalami kenaikan sebesar 39 hotel pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tetap di angka yang sama, yakni berjumlah 40 wajib pajak hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 32

²⁶ Tegalkab.go.id

restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan mengalami kenaikan sebesar 38 restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Tegal tahun 2014 yakni 994 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 806. Dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 858, dan diikuti peningkatan di tahun 2017.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Tegal dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.253.716.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 304.000.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 316.051.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 329.067.000.

27) Kabupaten Temanggung

Provinsi Jawa Tengah mempunyai dua puluh sembilan kabupaten dan enam kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah kabupaten Temanggung. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah kabupaten temanggung terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak di bagian hampir di setiap penjuru. Kondisi bentang alam relatif membujur dari utara ke sebelah selatan. Secara geografis, kabupaten temanggung terletak antara 110o23-110o4630 bujur timur dan 7o1470-3235 lintang selata. Luas wilayah kabupaten Temanggung 870,23 Km².²⁷

²⁷ Temanggungkab.go.id

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama yakni berjumlah 14 hotel. Sedangkan pada tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 21 hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 45 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Dan mengalami kenaikan sebesar 49 restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Temanggung tahun 2014 yakni 1007 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1210. Dan peningkatan itu terus berlanjut sampai tahun 2016 sampai tahun 2017, yaitu berjumlah 1336 dan 1565 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Temanggung dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.160.726.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 212.498.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 281.328.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 301.422.000.

28) Kabupaten Wonogiri

Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kabupaten Wonogiri terletak di koordinat: 7° 48' 50.569" LS, 110° 55' 33.057" BT. Wilayah administrasi kabupaten Wonogiri

terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 297kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 509,72 jiwa/ dan luas wilayah sebesar 1.822,37 . Kabupaten Wonogiri memiliki populasi sebesar 928.904 jiwa.²⁸

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Wonogiri tahun 2014 kurang lebih sekitar 25 hotel. Dan turun menjadi 20 hotel pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, di wilayah ini jumlah wajib pajak hotel naik menjadi 21, dan terus meningkat hingga 26 hotel pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 berjumlah 41 restoran. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2015 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 43 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2017, mengalami penurunan hingga 41 wajib pajak restoran.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kabupaten Wonogiri tahun 2014 yakni 908 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1095. Dan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1007 dan 935.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Wonogiri dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 182.149.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp.211.206.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 218.604.000. Dan terus

²⁸ Wonogirikab.go.id

mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 333.840.000.

29) Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo berjarak 120km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520km dari Ibukota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl – 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl -1.000 dpl sebesar 50% dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi berada di tengah-tengah pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan.²⁹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kabupaten Wonosobo tahun 2014 sampai tahun 2105 berjumlah sekitar 39. Kemudian tahun 2016 mengalami penurunan hingga di angka 37. Selanjutnya di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi berjumlah 43 wajib pajak.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 61 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD kabupaten Wonosobo tahun 2014 yakni 1229 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1762. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 1310. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi sebesar 1039 reklame.

²⁹ Wonosobokab.go.id

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Wonosobo dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.175.319.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 182.607.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 199.894.000. Dan di tahun 2017 mengalami penurunan hingga Rp. 182.959.000.

30) Kota Magelang

Perkembangan dan dinamika Kota Magelang yang pesat sebagai Kota Jasa saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang ada walaupun luasnya hanya 18,12 Km². Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110°12'30" - 110°12'52" Bujur Timur dan 7°26'28" - 7°30'9" Lintang Selatan serta terletak pada posisi strategis, karena berada tepat di tengah-tengah.³⁰

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kota Magelang tahun 2014 berjumlah 16. Kemudian tahun 2015 berjumlah 17 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 tetap di angka yang sama yaitu berjumlah 25 wajib pajak.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 91 restoran yang tercantum pada BPPKAD sektor pajak daerah. Dan pada tahun berikutnya berjumlah 121 wajib pajak.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kota Magelang tahun

³⁰ Magelangkota.go.id

2014 yakni 1004 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 1180. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 1244. Dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1301 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kota Magelang dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.164.927.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 186.677.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 285.977.000. Dan di tahun 2017 mengalami penurunan hingga Rp. 275.005.000.

31) Kota Pekalongan

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 6°50`42`` - 6°55`44`` Lintang Selatan dan 109°37`55`` - 109°42`19`` Bujur Timur. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.³¹

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kota Pekalongan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah 28 wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan hingga angka 26 wajib pajak.

³¹ Pekalongankota.go.id

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 100 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Kemudian pada tahun 2017 jumlah wajib pajak rsetoran mengalami kenaikan menjadi 112.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kota Pekalongan tahun 2014 yakni 983 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 993. Dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 904 wajib pajak, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 958 wajib pajak.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kota Pekalongan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.144.065.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 152.044.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 178.604.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 190.528.000.

32) Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di ketinggian 750-850 mdpl, dan terletak dilereng timur Gunung Merbabu yang membuat daerah Salatiga menjadi lebih sejuk. Pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan Rawa Pening yang indah membuat salatiga menjadi daerah yang indah dan spektakuler. Seluruh wilayah Salatiga dibatasi oleh Kabupaten Semarang, antara lain dibagian utara berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Pabelan, dibagian

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tenganan, dibagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, dibagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Tenganan dan Kecamatan Pabelan.³²

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kota Salatiga tahun 2014 berjumlah 24. Kemudian tahun 2015 berjumlah 26 hotel. Kemudian tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 30. Dan di tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga 29 wajib pajak.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2017 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 20 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kota Salatiga tahun 2014 yakni 809 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 849. Dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan hingga 947. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 902 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kota Salatiga dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.165.747.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 167.010.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 203.768.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 225.413.000.

³² Jatengit14.wordpress.com

33) Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia dan ibukota provinsi Jawa Tengah. Semarang terletak $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur.

Letak geografis Semarang sangat berpengaruh besar pada lalu lintas perekonomian di Pulau Jawa, hal ini dikarenakan kota ini merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang, yaitu: koridor Pantai Utara, koridor Selatan atau yang dikenal sebagai koridor Merapi-Merbabu menuju ke Kabupaten Magelang dan Surakarta, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak atau Kabupaten Grobogan, dan koridor Barat menuju ke Kabupaten Kendal. Semarang juga berperan penting dalam perkembangan Jawa Tengah karena Semarang memiliki pelabuhan, jaringan tranport darat (yang berupa jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah.³³

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kota Semarang tahun 2014 kurang lebih sekitar 97 hotel. Dan naik menjadi 108 hotel pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, di wilayah ini jumlah wajib hotel menurun menjadi 100, dan terus menurun hingga 99 hotel pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017.

³³ Semarangkota.go.id

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2015 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 191 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2016, mengalami lonjakan yang tinggi menjadi 266 restoran, dan pada tahun 2017 menurun hingga 250.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kota Semarang tahun 2014 yakni 1097 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 1055. Dan peningkatan itu terus berlanjut sampai tahun 2016 sampai tahun 2017, yaitu berjumlah 1631 dan 1542 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kota Semarang dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 1.136.367.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp.1.201.581.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 1.491.645.000. Dan terus mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.393.654.000.

34) Kota Surakarta

Surakarta merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang termasuk bagian dari eks karesidenan Surakarta. Kota Surakarta terletak di koordinat:7°34'0"LU110°49'0"BT. Wilayah administrasi kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan yang terdiri dari 51 kelurahan, dengan kepadatan penduduk mencapai 13.636 jiwa/ dan luas wilayah sebesar 44,03 . Kota

Surakarta memiliki populasi sebesar 577.202 jiwa.³⁴

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kota Surakarta tahun 2014 kurang lebih sekitar 147 hotel. Dan naik menjadi 155 hotel pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 sampai tahun 2017, di wilayah ini jumlah wajib pajak hotel tetap di angka yang sama yaitu berjumlah 171 jumlah wajib pajak hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2015 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 267 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Sedangkan pada tahun 2016, mengalami lonjakan yang tinggi menjadi 312 restoran, dan pada tahun 2017 naik hingga 319.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kota Semarang tahun 2014 yakni 921 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 995. Sedangkan tahun 2016 turun sangat drastis mencapai jumlah 901, dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi 947 reklame.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kota Surakarta dari tahun ketahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp. 335.660.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 372.798.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 425.502.000. Dan pada tahun 2017, pendapatannya mengalami penurunan menjadi Rp. 406.030.000.

³⁴ Surakartakota.go.id

35) Kota Tegal

Kota Tegal terletak diantara 109°08` - 109°10` Bujur Timur dan 6°50` - 6°53` Lintang Selatan, dengan wilayah seluas 39,68 km² atau kurang lebih 39,68 Ha. Kota Tegal berada diwilayah Pantai Utara dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di wilayah barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 Km dan barat ke timur 9,7 Km. Dilihat dari letak geografis, posisin Kota Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantai utara jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan pulau jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya.³⁵

Jumlah wajib pajak hotel yang tersebar pada Kota Tegal tahun 2014 berjumlah 25. Kemudian tahun 2015 berjumlah 26 hotel. Kemudian tahun 2016 sampai tahun 2017 tetap konsisten di angka yang sama yaitu 29 wajib pajak hotel.

Jumlah wajib pajak restoran di wilayah ini dari tahun 2014 sampai tahun 2016 masih tetap di angka yang sama, yaitu berjumlah 26 restoran yang tercantum pada BPPKAD sector pajak daerah. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 30 wajib pajak.

Sedangkan jumlah pajak reklame yang tercatat pada BPPKAD Kota Tegal tahun 2014 yakni 669 reklame. Pada tahun 2015 jumlahnya naik menjadi 675. Dan pada tahun

³⁵ Tegalkota.go.id

2016 mengalami kenaikan hingga 729. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 berjumlah 856.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Kota Tegal dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dilihat dari tahun 2014, pendapatannya mencapai Rp.241.936.000. Dan pada tahun 2015, pendapatannya menjadi Rp. 271.601.000. Selanjutnya pada tahun 2016 naik menjadi Rp. 287.343.000. Dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 sebesar Rp. 306.830.000.

2. Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum dari data yang digunakan. Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang berupa variabel independen yaitu pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), pajak reklame (X3) dan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Variabel-variabel penelitian tersebut diinterpretasikan dalam nilai mean, median, maximum, minimum dan observasi. Penelitian ini menggunakan data pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah dan diperoleh sebanyak 140 data yang berasal dari perkalian antara periode penelitian yaitu sebanyak 35 perusahaan dengan rentan waktu selama 4 tahun yaitu tahun 2014-2017. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	PAD	HOTEL	RESTORAN	REKLAME
Mean	294048.6	46.38571	80.62857	1124.007
Median	266392.5	26.00000	53.00000	993.5000
Maximum	1491645.	250.0000	319.0000	2951.000
Minimum	144065.0	4.000000	9.000000	420.0000
Std. Dev.	168933.2	54.40966	68.62864	467.0444
Observations	140	140	140	140

Notes = PAD = Pendapatan asli daerah; HOTEL = Pajak hotel; RESTORAN = Pajak restoran; REKLAME = Pajak reklame

Sumber : Data diolah dengan eviws 9, 2019

Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan tabel tersebut, yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar 1491645 dan terendah sebesar 144065. Nilai mean dan median pendapatan asli daerah sebesar 294048.6 dan 266392.5. Adapun standar deviasi pendapatan asli daerah sebesar 168933.2. Nilai rata-rata (mean) pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen pendapatan asli daerah mampu menggambarkan data dengan baik.
- b. Pajak hotel (X_1) tertinggi sebesar 250.0000 dan terendah sebesar 4.000000. Nilai mean dan median pajak hotel sebesar 46.38571 dan 26.00000. Adapun standar deviasi pada pajak hotel sebesar 54.40966. Nilai rata-rata (mean) pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan standar

deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen pajak hotel tidak mampu menggambarkan data dengan baik.

c. Pajak restoran (X_2) tertinggi sebesar 319.000 dan pajak restoran terendah sebesar 9.000. Nilai mean dan median pajak restoran sebesar 80.62857 dan 53.00000. Adapun standar deviasi pada pajak restoran sebesar 68.62864. Nilai rata-rata (mean) pajak restoran lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen pajak restoran mampu menggambarkan data dengan baik.

d. Pajak reklame (X_3) tertinggi sebesar 2951.000 dan pajak reklame terendah sebesar 420.000. Nilai mean dan median pajak reklame sebesar 1124.007 dan 993.5000. Adapun standar deviasi pada pajak reklame sebesar 467.0444. Nilai rata-rata (mean) pajak reklame lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari seluruh data pada variabel independen pajak reklame mampu menggambarkan data dengan baik.

b. Uji Asumsi Klasik

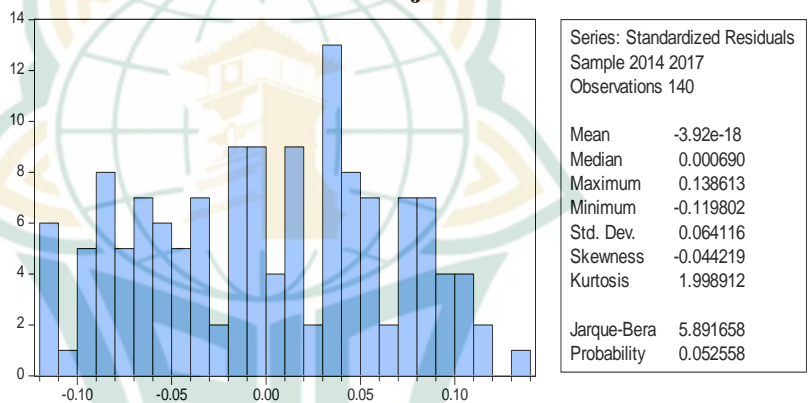
1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji asumsi normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a) Data terdistribusi normalitas, jika nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung $>$ tingkat alpha 0,05 atau
- b) Data terdistribusi tidak normalitas, jika nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung $<$ tingkat alpha 0,05.

Hasil pengujian asumsi klasik normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Uji Normalitas



Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai Prob. JB hitung sebesar $0.052558 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a) Data tidak terjadi multikolinieritas, bila nilai koefisien $<$ 0.80 atau

b) Data mengalami multikolinieritas, bila nilai koefisien > 0.80 .

Koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.3 Uji
Multikolinieritas**

	HOTEL	RESTORAN	REKLAME
HOTEL	1	0.67166	0.46950
RESTORAN	0.67166	1	0.25187
REKLAME	0.46950	0.25187	1

*Sumber : Data diolah dengan
evIEWS 9, 2019*

Hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independen pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame < 0.80 , sehingga model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terjadi ketidaksamaan varian dari residual model regresi. Data yang baik adalah data yang homoskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode statistik dengan uji Glejser. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

- a) Data tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai Probabilitas hitung $>$ tingkat alpha 0,05 atau
- b) Data mengalami heteroskedastisitas, jika nilai Probabilitas hitung $<$ tingkat alpha 0,05

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.120826	0.213481	-0.565978	0.5727
HOTEL	-0.013240	0.054355	-0.243586	0.8080
RESTORAN	0.075244	0.076841	0.979218	0.3298
REKLAME	0.017550	0.059101	0.296959	0.7671

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 9, 2019*

Hasil pengujian yang dilakukan terlihat bahwa nilai probability uji Glejser pada model menunjukkan nilai prob variabel independen pajak hotel memiliki nilai > 0.05 yaitu 0.8080, variabel pajak restoran sebesar 0.3298 dan variabel pajak reklame sebesar 0.7671, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

c. Estimasi Regresi Data Panel

1) Model *Common effect*

Model *common effect* merupakan pendekatan paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu sama. Hasil estimasi model *common effect* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Model *Common effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.391182	0.263200	20.48320	0.0000
HOTEL	0.121643	0.044736	2.719138	0.0074
RESTORAN	0.094441	0.047990	1.967941	0.0511
REKLAME	-0.100566	0.090827	-1.107218	0.2702

Sumber : Data diolah dengan *evIEWS 9, 2019*

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *common effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y : \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$PAD = 5.391182 + 0.121643 \text{hotel} + 0.094441 \text{restoran} + 0.100566 \text{reklame}$$

$$T\text{-Hitung} = \begin{matrix} (20.48320) & (2.719138) \\ (1.967941) & (-1.107218). \end{matrix}$$

2) Model *Fixed effect*

Model *Fixed effects* mengasumsikan adanya perbedaan antar objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama *fixed effect* disini maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya. Hasil estimasi model *fixed effect* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Model *Fixed effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.835641	0.219184	17.49967	0.0000
HOTEL	0.527473	0.064741	8.147444	0.0000
RESTORAN	0.160430	0.049623	3.232960	0.0017
REKLAME	0.179723	0.068961	2.606135	0.0105

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &: \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \\
 \text{PAD} &= 3.835641 + 0.527473 \text{hotel} + \\
 & 0.160430 \text{restoran} + \\
 & 0.179723 \text{reklame} \\
 \text{T-Hitung} &= (17.49967) \quad (8.147444) \\
 & (3.232960) \quad (2.606135).
 \end{aligned}$$

3) Model *Random effect*

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari model fixed effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model antar waktu dan antar objek. Hasil estimasi model *random effect* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Model *Random effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.100451	0.291695	17.48559	0.0000
HOTEL	0.235202	0.062613	3.756455	0.0003
RESTORAN	0.034832	0.073931	0.471134	0.6383
REKLAME	-0.024264	0.096620	-0.251126	0.8021

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan hasil regresi diatas, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *random effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &: \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \\
 \text{PAD} &= 5.100451 + 0.235202 \text{hotel} + \\
 & 0.034832 \text{restoran} - \\
 & 0.024264 \text{reklame} \\
 \text{T-Hitung} &= (17.48559) \quad (3.756455) \\
 & (0.471134) \quad (-0.251126)
 \end{aligned}$$

d. Pemilihan Model Regresi Data Panel

1) Uji Chow Pada Model *Fixed effect*

Chow test atau likelihood ratio test merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. *cross section F* > 0.05 atau

H_a diterima bila nilai Prob. *cross section F* < 0.05

Hasil pengujian model *fixed effect* menggunakan uji chow dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.36389	2	(34,102) 0.0000

Sumber : Data diolah dengan *eviews* 9, 2019

Hasil pengujian uji chow, menunjukkan bahwa probabilitas *cross section F* adalah

sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_a (H_1, H_2, H_3, H_4) diterima dan H_0 ditolak. Maka metode yang sesuai dalam penelitian dan teknik terbaik untuk melakukan uji regresi adalah metode *fixed effect*.

2) Uji Hausman Pada Metode *Random effect*

Uji *hausman* juga dilakukan untuk memilih manakah yang lebih cocok digunakan antara *fixed effect* dan *random Effect*, dengan hipotesis:

$H_0 = \text{Random effect model}$

$H_a = \text{Fixed effect model}$

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H_0 diterima bila nilai Prob. *Cross section random* > 0.05 atau

H_a diterima bila nilai Prob. *Cross section random* < 0.05

Adapun hasil pengujian model *random effect* menggunakan uji hausman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.358160	3	0.0006

Sumber : Data diolah dengan *views* 9, 2019

Hasil uji Hausman diketahui bahwa probabilitas *cross section random* pada model sebesar 0.0006 lebih kecil dari alpha (0.05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak, maka

artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*.

e. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Berganda Data Panel

Hubungan variabel independen pajak hotel (X1), pajak restoran (X2) dan pajak reklame (X3) terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah (Y) dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel. Adapun hasil estimasi persamaan yang telah dilakukan setelah melalui uji chow dan uji hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan hasil estimasi sebagai berikut:

Lihat pada tabel 4.7

Berdasarkan hasil regresi tersebut, model persamaan untuk persamaan dengan menggunakan metode *fixed effect* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y : \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$PAD = 3.835641 + 0.527473 \text{ hotel} + 0.160430 \text{ restoran} + 0.179723 \text{ reklame}$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Konstanta a sebesar 3.835641, artinya apabila pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame sebesar 0, maka pendapatan asli daerah sebesar 3.835641.
- b) Nilai koefisien variabel pajak hotel sebesar 0.527473. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel memiliki hubungan positif terhadap variabel pendapatan asli daerah. Artinya apabila

variabel independen pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 1% sementara variabel independen pajak restoran dan pajak reklame bersifat tetap maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 52.75%.

c) Nilai koefisien variabel pajak restoran sebesar 0.160430. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak restoran memiliki hubungan positif terhadap variabel pendapatan asli daerah. Artinya apabila variabel independen pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 1% sementara variabel independen pajak hotel dan pajak reklame bersifat tetap maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 16.04%.

d) Nilai koefisien variabel pajak reklame sebesar 0.179723. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak reklame memiliki hubungan positif terhadap variabel pendapatan asli daerah. Artinya apabila variabel independen pajak reklame mengalami kenaikan sebesar 1% sementara variabel independen pajak hotel dan pajak restoran bersifat tetap maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 17.97%.

2) Signifikansi Parsial (uji t)

uji statistik t adalah uji untuk untuk mengetahui apakah secara individu variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah :

a) Jika nilai prob. $\leq \alpha$ (0.05) dan $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka H_a diterima

Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai prob $\geq \alpha$ (0.05) dan $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka H_a ditolak

Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (df) adalah $df = n-k-1 = 140-3-1 = 136$, sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1.65613. Hasil uji t parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.10 Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.835641	0.219184	17.49967	0.0000
HOTEL	0.527473	0.064741	8.147444	0.0000
RESTORAN	0.160430	0.049623	3.232960	0.0017
REKLAME	0.179723	0.068961	2.606135	0.0105

Sumber : Data diolah dengan evIEWS 9, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka:

a) $H_1 =$ (Diduga Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah)

Nilai prob. variabel pajak hotel < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0000 < 0,05$ dan t hitung > t tabel sebesar $8.147444 > 1.65613$, sehingga variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan pada penelitian menerima H_1 artinya pajak hotel

berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah.

- b) H₂ = (Diduga Pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah)

Nilai prob. variabel pajak restoran > nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0017 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3.232960 > 1.65613$, sehingga variabel pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan pada penelitian menerima H₂ artinya pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah.

- c) H₃ = (Diduga Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah)

Nilai prob. variabel pajak reklame < nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) sebesar $0.0105 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2.606135 > 1.65613$, sehingga variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan pada penelitian menerima H₃ artinya pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah.

3) Uji F Simultan

Uji f digunakan untuk membuktikan apakah apakah secara bersama-sama seluruh variabel independennya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen yaitu pendapatan asli daerah. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

a) Jika nilai $Prob. \leq \alpha$ (0.05) dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_4 diterima

H_4 diterima yaitu diduga Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah.

b) Jika nilai $Prob \geq \alpha$ (0.05) dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_4 ditolak dan H_0 diterima

H_0 diterima yaitu diduga Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak reklame tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah.

Nilai f tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas (df) adalah $df = 140 - k - 1 = 140 - 3 - 1 = 136$, sehingga diperoleh nilai f tabel sebesar 2.67. Hasil uji f parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.885384	Mean dependent var	8.957481
Adjusted R-squared	0.843807	S.D. dependent var	4.798063
S.E. of regression	0.074847	Sum squared resid	0.571415
F-statistic	21.29528	Durbin-Watson stat	1.761112
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan *eviews 9, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari α (0.05) yaitu sebesar $0.000000 < 0.05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $21.29528 > 2.67$ yang artinya pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan pada penelitian menerima H_4

yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah.

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R square karena menggunakan lebih dari 1 variabel independen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.885384	Mean dependent var	8.957481
Adjusted R-squared	0.843807	S.D. dependent var	4.798063
S.E. of regression	0.074847	Sum squared resid	0.571415
F-statistic	21.29528	Durbin-Watson stat	1.761112
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah dengan eviews 9, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Adjusted R -Squared (R^2) sebesar 0.843807. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 84.38 % sedangkan sisanya 15.62% (100% - 84.38%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

B. Pembahasan

Tabel 4.13

Hubungan Variabel Independen terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten kabupaten di Jawa Tengah

Variabel	Hubungan yang ditemukan	Signifikansi
Pajak Hotel	Positif (+)	Signifikan
Pajak Restoran	Positif (+)	Signifikan
Pajak Reklame	Positif (+)	Signifikan
Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hotel.	Positif (+)	Signifikan

1. Pembahasan Secara Parsial

a. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis pertama, diperoleh hasil secara parsial Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah tahun 2014-2017. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang diperoleh nilai-nilai probabilitas $0.0000 < 0,05$. Serta $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ sebesar $8.147444 > 1.65613$. Maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima H_0 . Artinya Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik Pajak Hotel akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya jika semakin rendah Pajak Hotel maka rendah pula terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adanya pengaruh variabel Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan oleh semakin meningkatnya tempat penginapan/hotel di provinsi Jawa Tengah terutama pada tempat yang terdapat banyak lokasi wisata yang membutuhkan fasilitas jasa penginapan/pariwisata seperti losmen, gubuk pariwisata, hotel dan sejenisnya. Hal ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin banyak pengguna jasa penginapan maka semakin banyak pula pendapatannya. Jadi Pajak Hotel dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Teguh Erawati dan Miftah Hurohman (2015), dan Oktary Handini, Dwi Fitri Puspita, dan Ethika (2013) menunjukkan adanya pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis kedua menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah tahun 2014-2017. Dibuktikan dengan pengujian regresi didapatkan nilai probabilitas $0.0017 < 0,05$. Serta t hitung $> t$ tabel sebesar $3.232960 > 1.65613$. Artinya Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pejualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.³⁶

Hasil penelitian dari Ni Nyoman Suartini dan Made Suyana Utama (2011) dengan judul *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar* menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut didukung dengan bertambahnya jumlah restoran maka secara langsung akan berdampak pada pengaruh pajak restoran. Semakin tinggi pajak restoran semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah. Pajak daerah juga akan berdampak meningkatnya pendapatan asli daerah.³⁷

c. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis ketiga, diperoleh hasil secara parsial Pajak Reklame berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten kabupaten Jawa Tengah tahun 2014-2107. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian yang diperoleh nilai nilai probabilitas sebesar $0.0105 < 0,05$. Serta $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2.606135 > 1.65613$. maka dapat diambil

³⁶ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 67

³⁷ Ni Nyoman Suartini, Made Suyana Utama, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud) Bali, 2011, 175-187.

kesimpulan untuk menerima H_0 . Artinya Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan karena adanya penyelenggaraan reklame, dimana reklame juga dapat digunakan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat.³⁸

Adanya pengaruh variabel Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di provinsi Jawa Tengah, terutama pada aktifitas perekonomian dan penyelenggaraan reklame hal ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak poster-poster, selebaran dan lain sebagainya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktary Handini, Dwi Fitri Puspita, dan Ethika (2013) yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pembahasan Secara Simultan

Dari hasil perhitungan tabel 4.13 diperoleh F hitung sebesar 21.29528 sementara pada F tabel sebesar 2.67 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000000. Hal tersebut berarti bahwa secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah tahun 2014-2017.

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27